



ANALISIS SENTIMEN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (KIHT) PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Asyifa Amani Fatihah ¹⁾, Muhammad Miftah Babil Yasar ^{2)*}, Syikayah Aulia ³⁾, Hilma Mutiara Winata ⁴⁾

¹⁾ amaniisyfa18@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

²⁾ abilyasar04@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

³⁾ syikayahaulia@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

⁴⁾ hilmamutiarawinata@uinsgd.ac.id, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*penulis korespondensi

Abstract

Analyze public sentiment towards the implementation of the Tobacco Industry Zone Policy (KIHT) regulated in PMK No. 21/PMK.04/2020 on Instagram social media. A quantitative method was used by collecting 6,350 comment and caption data using the keyword "cigarette tax." Sentiment classification was carried out using a Deep Learning approach through fine-tuning the IndoBERT language model, which was validated with high performance (91.5% accuracy). The results showed that public discourse on Instagram tended to be dominated by negative sentiment (39.87%) compared to positive sentiment (33.34%). Thematic negative sentiment was triggered by concerns over the burden of tax increases and criticism of the massive circulation of illegal cigarettes, while positive sentiment was driven by support for the empowerment of SMEs. The conclusion shows a gap between policy design and public acceptance. This study recommends that regulators evaluate the tax structure and improve public communication and law enforcement to reduce social resistance.

Keywords: Cigarette Tax; IndoBERT; Instagram; KIHT; Sentiment Analysis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen masyarakat terhadap implementasi Kebijakan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang diatur dalam PMK No. 21/PMK.04/2020 pada media sosial Instagram. Metode kuantitatif digunakan dengan mengumpulkan 6.350 data komentar dan caption menggunakan kata kunci "cukai rokok". Klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan pendekatan Pembelajaran Mendalam melalui model bahasa IndoBERT, yang divalidasi dengan kinerja tinggi (Akurasi 91.5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus publik di Instagram cenderung didominasi oleh sentimen Negatif (39.87%) dibandingkan sentimen Positif (33.34%). Sentimen negatif secara tematik dipicu oleh kekhawatiran terhadap beban kenaikan cukai dan kritik terhadap peredaran rokok ilegal yang masih masif, sementara sentimen positif didorong oleh dukungan terhadap pemberdayaan IKM. Kesimpulan menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan penerimaan publik. Penelitian ini merekomendasikan regulator untuk mengevaluasi struktur cukai dan meningkatkan komunikasi publik serta penegakan hukum untuk mereduksi resistensi sosial.

Kata Kunci: Analisis Sentimen; IndoBERT; Instagram; KIHT; Pajak Rokok

PENDAHULUAN

Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis di Indonesia, yang memainkan peran ganda sebagai penyerap tenaga kerja substansial dan penyumbang terbesar kedua penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT) (Kemenkeu, 2023). Pada tahun 2024, perkebunan tembakau di Indonesia tersebar di sejumlah provinsi dengan total luas area mencapai 267,06 ribu hektare dan total produksi mencapai 351,36 ribu ton. Provinsi dengan luas area tembakau terbesar adalah Jawa Timur dengan 147,93 ribu hektare, diikuti oleh Jawa Tengah (54,85 ribu hektare), Nusa Tenggara Barat (44,33 ribu hektare), Jawa Barat (9,27 ribu hektare), dan Aceh (2,73 ribu hektare). Dari sisi produksi, Jawa Timur juga menempati urutan pertama dengan produksi sebanyak 186,51 ribu ton, disusul oleh Jawa Tengah (69,33 ribu ton), Nusa Tenggara Barat (77,35 ribu ton), Jawa Barat (8,87 ribu ton), dan Sumatera Utara (1,94 ribu ton). Tingkat produksi tembakau Indonesia pada tahun 2024 mencapai 351,36 ribu ton, mencerminkan kontribusi besar dari provinsi-provinsi sentra tembakau di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara (BPS, 2025). Industri hasil tembakau juga menjadi salah



satu sektor strategis hasil perkebunan yang memiliki daya saing tinggihan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai (Marbun, 2025). penerimaan dari cukai hasil tembakau tahun 2024 memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 2,0% (yoy). Adapun penerimaan cukai terdiri dari penerimaan hasil tembakau sebesar Rp216,9 triliun, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Rp9,2 triliun, dan etil alkohol (EA) sebesar Rp141,1 miliar (Cukai, 2025).

Dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat kebijakan baru yang memuat tentang pengalokasian dana pajak atau earmarkingtax. Pengalokasian dana pajak atau earmarking tax adalah pengalokasian sejumlah penerimaan pajak untuk mendanai sektor pajak tertentu sesuai dengan pajak yang dipungut (Iskandar et al., 2019). Konteks earmarking di indonesia terhadap produk tembakau dikenal sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) (Nugroho & Asmorowati, 2024). Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 yang menjelaskan DBHCHT dialokasikan menjadi 25% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, serta 25% untuk penegakan hukum, khusus untuk bidang kesejahteraan umum pada aturan ini dijelaskan alokasi bidang kesejahteraan masyarakat di breakdown menjadi 20% untuk membantu peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, pembinaan industri, serta 30% untuk pemberian bantuan (Kemenkeu, 2022)

Dalam upaya menata sektor ini agar lebih terkontrol, pemerintah dituntut untuk menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan IKM sekaligus mengoptimalkan pengawasan. Sebagai respons terhadap tantangan dualisme ini, pemerintah menerbitkan kebijakan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.04/2020. Kebijakan ini memiliki tujuan ganda: pertama, memberikan fasilitas kawasan industri khusus untuk memberdayakan dan membina Industri Kecil Menengah (IKM) sektor tembakau; dan kedua, menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif untuk meningkatkan pengawasan dan menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara (Kemenkeu, 2020). Intervensi struktural ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem IHT yang lebih patuh, legal, dan berdaya saing. Meskipun bertujuan positif, implementasi KIHT memunculkan tantangan birokrasi dan resistensi sosial. Kritik sering muncul terkait beban kepatuhan cukai dan efektivitas penanggulangan rokok ilegal, yang memengaruhi social acceptance kebijakan tersebut. Sentimen publik yang terekam di media sosial, terutama Instagram, menjadi indikator krusial dalam mengukur keberhasilan implementasi dan mengidentifikasi kesenjangan antara design kebijakan dengan realitas di lapangan (Grindle, 1980).

Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan memetakan pola sentimen (positif, negatif, netral) masyarakat di Instagram terhadap KIHT. Hasil analisis sentimen ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang valid bagi pembuat kebijakan untuk penyempurnaan implementasi di masa mendatang (Anderson et al., 2024). sektor tembakau; dan kedua, menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif untuk meningkatkan pengawasan dan menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Intervensi struktural ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem IHT yang lebih patuh, legal, dan berdaya saing.

KAJIAN PUSTAKA



Kebijakan Cukai dan Industri Hasil Tembakau

Kebijakan cukai merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi, menekan dampak kesehatan, serta meningkatkan penerimaan negara (Kemenkeu, 2023). Dalam industri hasil tembakau, kebijakan cukai juga berfungsi menata struktur produksi serta menekan peredaran rokok ilegal, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi negara.

Untuk memperkuat tata kelola industri, pemerintah memperkenalkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai kawasan produksi terpusat bagi pelaku industri kecil. KIHT bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi cukai, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan ekosistem usaha yang lebih terawasi.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal terhadap rokok sering menimbulkan resistensi publik, terutama karena kenaikan harga dinilai membebani kelompok berpendapatan rendah (A. Suryani & Arif Widodo, 2022). Selain itu, keberadaan rokok ilegal yang masih marak memperkuat persepsi bahwa implementasi pengawasan belum optimal. Kondisi ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan kebijakan dan persepsi publik mengenai dampaknya.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebijakan cukai dan KIHT perlu melihat tidak hanya aspek regulasi, tetapi juga bagaimana publik merespons kebijakan tersebut. Analisis sentimen berbasis media sosial menjadi penting untuk menangkap persepsi masyarakat secara langsung.

Persepsi Publik dan Penerimaan Kebijakan

Persepsi publik memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana suatu kebijakan diterima dan dijalankan. (Dunn, 2018a) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada desain teknisnya, tetapi juga pada bagaimana publik memahami, menilai, dan merasakan dampaknya. Dengan kata lain, kebijakan yang secara teknokratis baik sekalipun dapat ditolak apabila tidak sejalan dengan persepsi, nilai, atau kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks kebijakan cukai rokok, persepsi publik seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial yang bersifat sangat personal, seperti kemampuan membeli rokok, preferensi konsumsi, serta pengetahuan tentang alasan pemerintah menaikkan cukai.

(Wahab, 2008) menjelaskan bahwa persepsi kebijakan sangat dipengaruhi oleh trust kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika publik percaya bahwa kebijakan dibuat demi kepentingan bersama, resistensi cenderung lebih rendah. Namun ketika pemerintah dianggap tidak konsisten, tidak transparan, atau tidak adil, maka persepsi negatif lebih mudah terbentuk. Kondisi ini sangat jelas terlihat dalam wacana cukai rokok, di mana masyarakat mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal, sementara tarif cukai bagi produsen legal terus dinaikkan. Ketidakseimbangan persepsi antara “beban ekonomi” dan “manfaat kebijakan” menjadi penyebab utama resistensi publik.

Selain faktor kepercayaan, persepsi publik juga dipengaruhi oleh cara kebijakan dikomunikasikan. (McQuail, 2010) menegaskan bahwa komunikasi publik memegang peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang suatu isu kebijakan. Jika komunikasi pemerintah tidak mampu menjelaskan tujuan, manfaat, dan urgensi kebijakan dengan baik, publik cenderung mengisi kekosongan informasi dengan asumsi negatif. Dalam kasus kebijakan cukai dan KIHT, publik seringkali tidak mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai manfaat jangka panjang seperti stabilitas industri, pengurangan rokok ilegal, dan peningkatan penerimaan negara.

Dengan demikian, persepsi publik terhadap kebijakan cukai rokok merupakan hasil dari interaksi antara faktor ekonomi, sosial, kepercayaan publik, serta efektivitas komunikasi pemerintah. Analisis terhadap persepsi publik melalui media sosial penting dilakukan karena mampu menangkap realitas opini masyarakat secara langsung dan apa adanya.



Teori Implementation Gap

Teori implementation gap yang diperkenalkan (Merilee S. Grindle, 1980) menjelaskan bahwa terdapat jarak antara tujuan kebijakan (policy intention) dan kenyataan pelaksanaannya (policy implementation). Walaupun kebijakan dirancang dengan baik, hasilnya dapat berbeda ketika bertemu kondisi lapangan yang kompleks, seperti kapasitas aparatur, koordinasi antarinstansi, serta respons masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan tidak selalu berjalan sebagaimana direncanakan karena dipengaruhi faktor di luar dokumen regulasi.

Dalam konteks kebijakan cukai rokok, implementation gap terlihat dari masih maraknya peredaran rokok ilegal meskipun pemerintah terus meningkatkan tarif cukai dan memperluas operasi penindakan. Tujuan besar kebijakan untuk menekan produksi ilegal tidak sepenuhnya tercapai karena pengawasan di lapangan menghadapi keterbatasan sumber daya dan jaringan distribusi ilegal yang sulit dilacak. Hal ini membuat publik mempertanyakan efektivitas kebijakan, terutama ketika produsen legal terbebani tarif tinggi sementara pelaku ilegal tetap beroperasi.

Kondisi tersebut kemudian berpengaruh pada persepsi masyarakat di media sosial. Banyak komentar menunjukkan bahwa publik melihat kesenjangan nyata antara kebijakan yang diumumkan dan hasil yang mereka rasakan. Sentimen negatif muncul bukan hanya karena beban ekonomi akibat kenaikan tarif, tetapi juga karena ketidakpercayaan terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian, teori implementation gap membantu menjelaskan mengapa resistensi publik dapat terbentuk walaupun tujuan kebijakan bersifat positif.

Media Sosial sebagai Ruang Diskursus Kebijakan

Media sosial kini menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat dan membentuk wacana publik mengenai isu-isu kebijakan. (Dijck, 2013) menyebut platform seperti Instagram sebagai bagian dari platform society, di mana opini publik terbentuk melalui kombinasi algoritma, interaksi sosial, dan konten visual. Karakteristik Instagram yang cepat, interaktif, dan mudah viral membuat diskursus kebijakan berkembang secara spontan dan emosional.

Dalam kasus kebijakan cukai rokok, media sosial berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan keresahan, kritik, maupun dukungan. Komentar publik pada unggahan-unggahan bertema cukai sering kali mencerminkan pengalaman langsung, seperti beban ekonomi atau ketidakpuasan terhadap maraknya rokok ilegal. Mekanisme likes, shares, dan komentar memperkuat opini tertentu sehingga membentuk persepsi kolektif mengenai kebijakan.

Selain itu, penggunaan hashtag seperti #cukai, #cukairokok, atau #rokokilegal membantu memusatkan percakapan dalam satu ruang semantik yang dapat diamati secara sistematis. Hashtag ini memudahkan peneliti mengumpulkan data sekaligus mengidentifikasi isu yang sedang dominan dalam diskursus publik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat publik berdiskusi, tetapi juga sumber data penting untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah secara real time.

Analisis Sentimen sebagai Evaluasi Persepsi Publik

Analisis sentimen merupakan pendekatan komputasional yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan opini publik berdasarkan ekspresi bahasa yang muncul dalam teks digital. Metode ini berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang diskursus publik. (Liu, 2020) menjelaskan bahwa analisis sentimen mampu menangkap reaksi masyarakat secara real-time, tanpa terdistorsi oleh bias survei atau batasan responden. Hal ini menjadikan analisis sentimen sebagai salah satu metode paling relevan untuk memahami persepsi publik terhadap isu kebijakan.

Dalam konteks kebijakan cukai rokok, analisis sentimen memungkinkan peneliti memetakan polaritas opini masyarakat apakah dominan positif, negatif, atau netral serta



mengidentifikasi isu spesifik yang memicu reaksi publik. Sentimen negatif biasanya berkaitan dengan aspek ekonomi seperti kenaikan harga, sedangkan sentimen positif muncul dari kelompok yang melihat manfaat kebijakan bagi negara dan industri. Dengan demikian, analisis sentimen tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai respons publik, tetapi juga mengungkap pola argumentasi dan tema-tema utama yang mendasari opini tersebut.

Lebih jauh, metode ini juga membantu menilai efektivitas komunikasi pemerintah. Ketika sebagian besar sentimen publik menunjukkan mispersepsi atau ketidakpahaman terhadap kebijakan, hal tersebut dapat menjadi sinyal bahwa strategi komunikasi perlu diperbaiki. Karena itu, analisis sentimen bukan sekadar alat teknis, tetapi juga instrumen evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dapat memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan implementasi kebijakan.

Natural Language Processing (NLP) dan Model Transformer

Perkembangan Natural Language Processing (NLP) telah merevolusi cara peneliti menganalisis teks dalam jumlah besar. NLP memungkinkan komputer memahami struktur bahasa manusia, termasuk konteks, emosi, dan hubungan antar kata. Salah satu terobosan terbesar dalam NLP adalah hadirnya arsitektur Transformer, yang diperkenalkan oleh (Vaswani et al., 2017). Model ini mampu memahami konteks kata dalam kalimat secara lebih akurat melalui mekanisme *self-attention*, sehingga sangat unggul dalam tugas klasifikasi sentimen.

Dalam penelitian berbahasa Indonesia, model IndoBERT menjadi salah satu model yang paling banyak digunakan karena dilatih menggunakan korpus bahasa Indonesia yang luas dan beragam. Penelitian (Koto et al., n.d.) menunjukkan bahwa IndoBERT mampu mencapai akurasi tinggi pada berbagai tugas NLP, termasuk analisis sentimen di media sosial yang sarat dengan slang, bahasa campuran, dan gaya bahasa informal. Hal ini menjadikan IndoBERT pilihan ideal untuk memproses komentar Instagram yang tidak mengikuti struktur bahasa baku.

Selain performanya yang unggul, model berbasis Transformer juga sangat efisien dalam mengidentifikasi pola semantik yang kompleks. Ketika diterapkan pada data sentimen kebijakan publik, model ini tidak hanya mengklasifikasikan polaritas, tetapi juga mampu menangkap nuansa konteks seperti kritik ekonomi, apresiasi publik, atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan IndoBERT memberikan landasan metodologis yang kuat untuk menghasilkan analisis sentimen yang lebih akurat dan kredibel dalam penelitian ini.

METODE

Sumber & Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari konten publik di platform Instagram, khususnya pada bagian komentar dan caption dari unggahan yang relevan dengan isu cukai rokok. Pemilihan Instagram didasarkan pada tingginya aktivitas diskusi publik di media sosial tersebut, terutama terkait topik kebijakan fiskal dan konsumsi produk tembakau. Selain itu, Instagram memungkinkan peneliti memperoleh data opini masyarakat secara langsung, spontan, dan tidak terstruktur, sehingga cocok digunakan dalam penelitian analisis sentimen.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *web crawling* menggunakan kata kunci utama “cukai rokok”. Teknik ini memungkinkan pengambilan data secara otomatis dari berbagai unggahan publik yang memuat kata kunci tersebut. Proses *crawling* dilakukan dalam rentang waktu dari unggahan tersebut di posting hingga saat kami *crawling* data yaitu hingga tanggal 18 November, dengan tujuan memastikan data yang diambil merupakan percakapan terkini dan relevan dengan konteks kebijakan yang sedang berlangsung pada periode tersebut.

Dalam tahap ini, sistem *crawling* menghasilkan total 6.350 unit data mentah, yang terdiri dari kumpulan komentar pengguna, caption unggahan, serta elemen teks lain yang sesuai dengan kriteria pencarian. Data yang terkumpul kemudian disimpan dalam bentuk dataset awal



sebelum melalui tahap penyaringan (*cleaning*) dan klasifikasi lebih lanjut.

Pra-pemrosesan Data (Preprocessing)

Data mentah diolah melalui tiga langkah utama: (1) Penghilangan *Noise*: Menghilangkan username, URL, tanda baca, stopwords, dan tagar; (2) *Case Folding*: Normalisasi seluruh teks menjadi huruf kecil (*lowercase*); (3) Normalisasi Bahasa (*Slang Correction*): Mengoreksi kata-kata tidak baku atau slang menjadi bentuk baku.

Analisis & Klasifikasi data

Penelitian ini menggunakan IndoBERT sebagai model dasar untuk melakukan analisis sentimen terkait diskursus kebijakan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). IndoBERT merupakan model pre-trained berbasis arsitektur Transformer yang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia (Koto et al., n.d.). Sebagaimana dijelaskan oleh (Devlin et al., 2019), model indoBERT bekerja secara bidirectional sehingga mampu memahami konteks kata dari dua arah sekaligus, membuatnya unggul dalam tugas klasifikasi teks termasuk sentimen.

Model IndoBERT kemudian di-fine-tuned dengan menambahkan lapisan klasifikasi (*classification head*) untuk memprediksi tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Proses fine-tuning dilakukan menggunakan data yang telah dilabeli secara manual, sehingga parameter model dapat menyesuaikan diri dengan karakteristik wacana publik seputar kebijakan cukai rokok dan KIHT. Sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh (Howard & Ruder, 2018), fine-tuning memungkinkan model pre-trained menjadi lebih sensitif terhadap konteks domain tertentu serta meningkatkan performa dibandingkan pelatihan dari awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa kata kunci “cukai rokok” merupakan istilah yang paling sering digunakan masyarakat ketika membahas isu kenaikan harga rokok, rokok ilegal, dan kebijakan pemerintah di sektor tembakau. Dalam ekosistem media sosial, kata kunci ini berfungsi sebagai entry point untuk mengidentifikasi opini publik yang benar-benar muncul secara organik (Dijck, 2013). Pemilihan keyword ini memastikan bahwa analisis sentimen dilakukan pada percakapan yang aktif, terkini, dan relevan, bukan yang bersifat teknis atau terbatas pada kalangan tertentu seperti pelaku industri atau birokrat.

Analisis sentimen memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara tujuan kebijakan pemerintah dan cara publik memaknainya. Meskipun pemerintah merancang kebijakan cukai, pengawasan rokok ilegal, dan pengembangan KIHT sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara serta menata industri hasil tembakau, komentar publik justru menunjukkan resistensi yang cukup tinggi. Dominasi sentimen negatif menegaskan bahwa masyarakat belum merasakan atau memahami manfaat kebijakan sebagaimana yang dirancang. Banyak komentar menilai bahwa kenaikan harga rokok justru membebani, sementara pengawasan rokok ilegal dinilai belum efektif. Hal ini menunjukkan adanya gap antara policy intention dan public reaction, di mana implementasi kebijakan belum diterjemahkan menjadi pengalaman positif bagi masyarakat (Nutley et al., 2007).

Temuan lain menunjukkan bahwa publik juga belum melihat peran strategis KIHT sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Meskipun KIHT dirancang untuk memperkuat industri kecil dan meningkatkan penerimaan negara, sebagian besar komentar memperlihatkan ketidakpahaman atau keraguan terhadap manfaat kebijakan tersebut. Kondisi ini menguatkan temuan (I. Suryani & Widodo, 2022) bahwa persepsi publik terhadap kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pemerintah dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi. Dengan kata lain, sentimen negatif bukan hanya refleksi penolakan terhadap kebijakan, tetapi juga indikator adanya masalah komunikasi dan implementasi kebijakan di lapangan.

Hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa diskursus publik didominasi oleh sentimen



negatif sebesar 39.87%, diikuti sentimen positif sebesar 33.34% dan sentimen netral sebesar 26.79%. Dominasi sentimen negatif ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk lebih vokal ketika membahas isu yang dianggap merugikan, terutama isu yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan konsumsi (Liu, 2020). Sementara itu, keberadaan sentimen netral dalam proporsi yang cukup besar menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya hanya berusaha mencari informasi, menunjukkan adanya kebutuhan literasi kebijakan yang belum terpenuhi. Sentimen negatif terutama didorong oleh dua faktor utama. Pertama, kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga rokok akibat penyesuaian tarif cukai, yang dianggap memberatkan kelompok berpenghasilan rendah.

Reaksi seperti ini sejalan dengan teori ekonomi politik yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal terhadap barang konsumsi sensitif cenderung memicu resistensi publik (Bing Liu, 2012). Kedua, banyak komentar menyoroti persepsi kurangnya efektivitas pengawasan rokok ilegal, yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Fenomena ini sesuai dengan konsep implementation gap yang dijelaskan oleh (Merilee S. Grindle, 1980), yakni ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi pelaksanaan di lapangan. Sebaliknya, sentimen positif muncul dari pengguna yang menilai bahwa kebijakan pemerintah, termasuk keberadaan KIHT dan upaya penegakan hukum, berpotensi membantu pemberdayaan IKM tembakau serta meningkatkan pendapatan negara. Persepsi positif ini muncul dari pengguna yang memahami manfaat jangka panjang kebijakan, sesuai dengan prinsip bahwa framing kebijakan yang jelas dapat meningkatkan dukungan publik (Dunn, 2018).

Sentimen netral umumnya berasal dari komentar yang bersifat informatif atau pertanyaan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap transparansi, kejelasan tujuan kebijakan, dan penjelasan yang mudah dipahami. Kondisi ini memperkuat argumen (Nutley et al., 2007). bahwa komunikasi kebijakan yang lemah dapat menghambat proses evidence based policy making.

Distribusi Sentimen Masyarakat

Kategori Sentimen	Jumlah Data (N)	Persentase (%)
Negatif	2.532	39.87%
Positif	2.117	33.34%
Netral	1.701	26.79%
TOTAL	6.350	100.00%

Temuan kunci menunjukkan dominasi sentimen Negatif (39.87%) dalam diskursus publik di Instagram.

Sample Komentar Negatif, Positif dan Netral

Komentar Negatif (teks sudah dibersihkan)

- a. *“ini terjadi disembark industri tidak cuman rokok”*
- b. *“ekonomi lemah itu karena judol dan pinjol, uangnya lari ke bandar2 di luar negeri. jadi daya beli berkurang, ekonomi lemah”* *“nyari duit gede dari rokok, biar pelan2 industri rokok mati, kalo udah bangkrut industri rokoknya mereka gk peduli karna itu tujuan mereka, sama pekerjanya apa lagi, bodo amat”*
- c. *“kalo mau kasih cukai tinggi. mending ke minum2an manis tuh. udah banyak banget anak2 yang kena gagal ginjal karena terlalu banyak minuman manis, termasuk orang dewasa”*
- d. *“pabrik rokok harus paksa ambil tembakau lokal.”*

Komentar Positif (teks sudah dibersihkan)

- a. *“harapan bsr d pundak bapak”*
- b. *“wahhhhhh inj baru keren, akhirnya ada yang logika nya bagus”*



- c. “pak purbaya terbaik 🍑👏👏👏”
- d. “coba anggota dpr cerdas kayak gini pikirannya, indonesia akan lebih maju 🍑🍑🍑”
- e. “dengernya aja da senang. smoga terwujud apa yang dibilang bapak ni. gak cm bs ngorbani rakyat aja. tapi bapak ni punya solusi bukan hanya untuk rakyat, tapi jg utk pemerintah dan pengusaha...”
Komentar Netral (teks sudah dibersihkan)
- a. “jadi penasaran jaman pemerintahan fir'aun biaya cukainya berapa 🤔🤔”
- b. “jadilah marak rokok tanpa cukai”
- c. “ayo pa menteri waktunya beres2 di bea cukai...”
- d. “tinggi rendahnya cukai rokok yang bayar cukai tatap perokok / pembelinya,”
- e. “turunkan cukai rokok”

Pembahasan Kinerja Model

Model analisis sentimen menggunakan IndoBERT menunjukkan akurasi sebesar 91.5%, yang mengindikasikan reliabilitas model dalam memproses teks Instagram. Kinerja ini konsisten dengan penelitian sebelumnya bahwa model berbasis transformer seperti BERT unggul dalam memahami konteks bahasa, termasuk bahasa informal dan slang yang umum digunakan di media sosial (Devlin et al., 2019). Dengan demikian, hasil klasifikasi sentimen dapat dianggap kredibel dan representatif terhadap opini publik

Analisis Isu Pendorong Sentimen Negatif

Analisis tematik terhadap komentar negatif menunjukkan bahwa sentimen negatif terutama dipicu oleh dua isu utama. Pertama, kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga rokok dan tambahan beban cukai, yang dianggap semakin memberatkan kondisi ekonomi kelompok perokok, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Reaksi ini sejalan dengan literatur yang menjelaskan bahwa kebijakan fiskal terhadap barang konsumsi sensitif sering memunculkan resistensi publik karena bersinggungan langsung dengan pengeluaran sehari-hari (Bing Liu, 2012). Kedua, banyak komentar menyoroti masih maraknya peredaran rokok ilegal, yang dianggap mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya implementation gap, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan (Merilee S. Grindle, 1980). Kombinasi kedua isu ini memperlihatkan bahwa resistensi publik bukan hanya terkait kebijakan cukai itu sendiri, tetapi juga menyangkut kualitas implementasinya

Analisis Isu Pendorong Sentimen Positif

Berbeda dengan itu, sentimen positif menunjukkan pola yang lebih konstruktif. Komentar bernada positif terutama muncul dari pengguna yang mendukung upaya pemerintah untuk memberdayakan industri kecil dalam ekosistem KIHT, yang dinilai dapat menciptakan iklim usaha yang lebih terregulasi dan legal bagi pelaku IKM hasil tembakau. Selain itu, sebagian pengguna mengapresiasi peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum, terutama terkait peredaran rokok ilegal, yang dianggap dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Dunn, 2018b), yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana manfaat kebijakan dipahami dan dirasakan oleh publik. Dengan demikian, sentimen positif dalam penelitian ini menggambarkan kelompok masyarakat yang melihat kebijakan cukai sebagai instrumen penguatan tata kelola dan ekonomi negara.

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data hanya dikumpulkan dari platform Instagram, sehingga belum menggambarkan persepsi masyarakat di platform lain seperti TikTok atau X. Kedua, penggunaan kata kunci “cukai rokok” meskipun relevan, tetap berpotensi mengabaikan percakapan yang menggunakan istilah lain. Ketiga, model IndoBERT



belum mampu sepenuhnya mengidentifikasi sarkasme atau ironi, yang banyak ditemukan dalam interaksi daring. Keempat, penelitian belum menganalisis karakteristik demografis pengguna, sehingga tidak dapat diketahui kelompok mana yang paling terdampak atau paling vokal. Keterbatasan ini memberikan ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan pendekatan multikanal dan analisis perilaku publik yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan cukai di Instagram dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, psikologis, dan implementasi kebijakan. Pemerintah perlu memperbaiki strategi komunikasi publik, terutama pada platform visual seperti Instagram, agar masyarakat dapat memahami konteks kebijakan dengan lebih baik dan tidak terjebak pada misinformasi yang beredar di media sosial.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan cukai hasil tembakau dan implementasi KIHT di Instagram didominasi oleh sentimen negatif (39,87%), dengan sentimen positif (33,34%) dan netral (26,79%). Sentimen negatif mencerminkan anggapan bahwa kebijakan belum memberikan dampak nyata, terutama terkait kenaikan tarif cukai dan pengawasan rokok ilegal yang belum optimal. Sebaliknya, sebagian masyarakat melihat potensi manfaat jangka panjang seperti pemberdayaan industri kecil dan peningkatan penerimaan negara. Secara umum, reaksi publik dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi dan transparansi kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B., Irzal, M., & Hendarno, A. (2024). Sentiment Analysis of Indonesia ' s Free School Lunch Policy Using LSTM and Word2Vec on YouTube Comments. *Journal of Computer Science and Applications*, 021, 36–44.
- Bing Liu. (2012). *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan & Claypool Publishers.
- BPS. (2025). *Statistik Tanaman Perkebunan Semusim Indonesia 2024 (Tebu dan Tembakau)* (Vol. 1). BPS Statistics Indonesia.
- Cukai. (2025). *Bea Cukai Lampau Target Penerimaan Senilai Rp226,4 Triliun*. Bea Cukai.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Association for Computational Linguistics*, 4171–4186.
- Dijck, J. van. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2018a). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th Edition). Routledge.
- Dunn, W. N. (2018b). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Sixth Edition). Routledge (Taylor & Francis Group).
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Howard, J., & Ruder, S. (2018). Universal language model fine-tuning for text classification. *Association for Computational Linguistics*, 328–229.
- Iskandar, F. V., Nangoi, G., & Runtu, T. (2019). PENERAPAN KEBIJAKAN EARMARKING TAX DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TERHADAP UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA THE APPLICATION OF THE TAX EARMARKING OF THE FUNDS OF BAI THE RESULT OF A CIGARETTE TAX ON PUBLIC HEALTH EFFORTS IN NORTH SU. *EMBA*, 7(2), 2481–2490.
- Kemenkeu. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.04/2020*.



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kemenkeu. (2022). *25/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kemenkeu. (2023). *Laporan Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan RI.
- Koto, F., Rahmaningtyas, N., Lau, J. H., & Baldwin, T. (n.d.). IndoBERT: A pretrained language model for Indonesian NLP. *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2020*, 757–770.
- Liu, B. (2020). *Sentiment Analysis: Mining Opinions in Social Media*. Springer.
- Marbun, F. K. (2025). *KEBIJAKAN CUKAI ROKOK SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL : STUDI KUALITATIF TENTANG DAMPAK KONSUMSI DAN PENERIMAAN NEGARA DI INDONESIA*. 7, 171–182.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory (6th ed.)*. Sage Publications.
- Merilee S. Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Nugroho, R., & Asmorowati, S. (2024). Implementasi kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK*, 15(1), 92–101.
- Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Policy Press.
- Suryani, A., & Arif Widodo. (2022). Persepsi publik terhadap kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap kepatuhan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vo 7(1), 33–47.
- Suryani, I., & Widodo, A. (2022). Public Response Toward Fiscal Policies in Consumer Goods. *Journal of Public Finance Studies, Volume 14*, 55–68.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., & Kaiser, Ł. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS / NIPS 30)*, 5998–6008.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.